



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LKjIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, Olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, 30 Januari 2023
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

H. MUHAMMAD YUSUF, S.Ag., M.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19711231 199903 1 060

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 3

 ✚ Tugas dan Fungsi..... 4

 ✚ Struktur Organisasi..... 9

C. Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat..... 10

D. Sumber Daya Manusia..... 12

E. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat..... 13

F. Sistematika Penyajian..... 14

BAB II. PERENCANAAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT..... 15

A. Perencanaan Strategis..... 15

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 17

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 21

 1. Kerangka Pengukuran..... 21

 2. Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja..... 22

B. Realisasi Anggaran..... 34

BAB IV. PENUTUP..... 39

A. Kesimpulan..... 39

B. Rekomendasi dan Saran..... 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

 1. Daftar Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

 2. Daftar Surat KeteranganTerdaftar (SKT) dan Surat Keterangan Keberadaan (SKK) Ormas Tahun 2023.

DAFTAR BAGAN & TABEL

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 3

Bagan Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat..... 9

C. Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 10

Tabel 1.1 Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah..... 10

Tabel 1.2 Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Bantuan Keuangan Partai Politik. 11

Tabel 1.3 Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Jumlah Ormas yang memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Provinsi Sulawesi Barat..... 11

D. Sumber Daya Manusia..... 12

Tabel 1. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Menurut Golongan..... 12

Tabel 2. Banyak Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2022..... 12

Tabel 3. Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat..... 12

BAB II. PERENCANAAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT..... 15

A. Perencanaan Strategis..... 15

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 16-17

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 17

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022..... 17-18

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022..... 18

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022..... 18-20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 21

A.1. Kerangka Pengukuran Kinerja..... 21

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..... 21

A.2 Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja..... 22

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1..... 22

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2..... 23

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3..... 24

Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.....	26
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.....	27
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.....	28-29
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.....	30
Tabel 3.9	Kegiatan-Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	31
B.	Realisasi Anggaran.....	32
Tabel 3.10	Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 1.....	34-35
Tabel 3.11	Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 2 & 3.....	36
Tabel 3.12	Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 4 & 5.....	36-37
Tabel 3.13	Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 6.....	37-38
Tabel 3.14	Rincian Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis 7.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah dan unsure penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 Tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan

politik.

 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
- e. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

 Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- c. Bidang Politik Dalam Negeri
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

2. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan, dan Karakter Bangsa Terdiri Atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Politik Dalam bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga

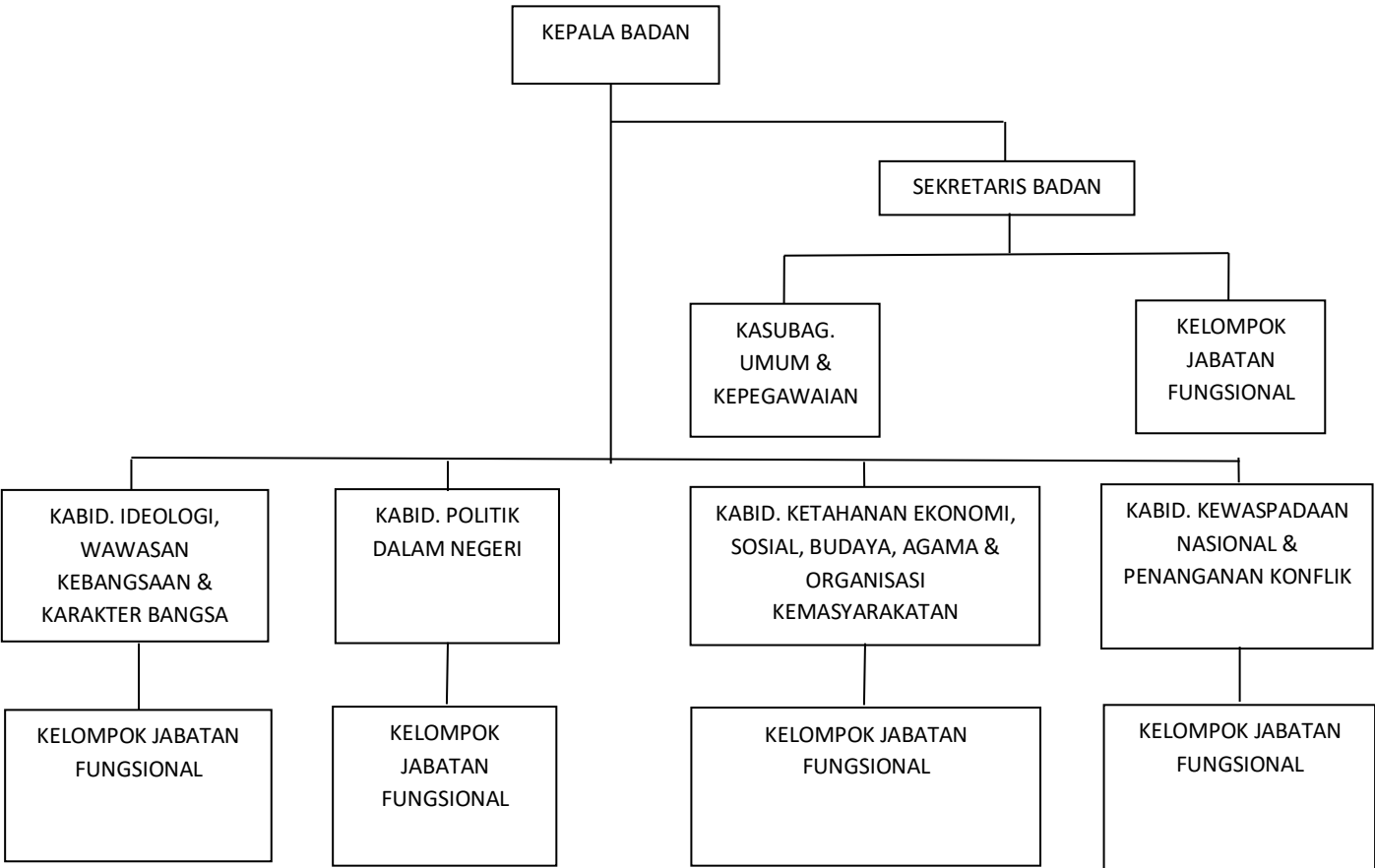
- asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sulawesi Barat



C. POTENSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Potensi Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Kesbang Kabupaten Mamuju, Kesbang Kabupaten Mamuju Tengah, Kesbang Kabupaten Pasangkayu, Kesbang Kabupaten Majene, Kesbang Kabupaten Polman dan Kesbang Kabupaten Mamasa dengan perincian sebagaimana pada,

Tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah :

Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
Mamasa	17	181	600	61.408	58.605	120.013	
Polewali Mandar	16	167	1.362	170.372	174.909	345.281	
Majene	8	82	554	61.099	63.344	124.443	
Mamuju	11	101	836	95.903	93.264	189.167	
Mamuju Tengah	5	54	415	48.124	46.185	94.309	
Pasangkayu	12	63	452	57.754	54.793	112.547	
Jumlah	69	648	4.219	494.660	491.100	985.760	

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Tahun Anggaran 2023 sangat perlu dilakukan dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan meskipun Pemilu dan Pilkada Serentak masih akan berlangsung Tahun 2024 sehingga pada tabel diatas belum dapat kami isi data jumlah TPS Tapi , karena untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Tahun Anggaran 2023 sangat perlu dilakukan. Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

Tabel 1.2. Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Bantuan Keuangan Partai Politik :

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Sah x 1.600 x 12 Bln	Yang Terima
Partai Nasional Demokrat	25.013	1.600 x 12	200.020.800
Partai Golongan Karya	96.081	1.600 x 12	153.729.600
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	89.814	1.600 x 12	143.702.400
Partai Nasional Demokrat	89.724	1.600 x 12	143.558.400
Partai Gerakan Indonesia Raya	74.287	1.600 x 12	118.859.200
Partai Amanat Nasional	57.331	1.600 x 12	91.729.600
Partai Hati Nurani Rakyat	41.979	1.600 x 12	67.166.400
Partai Kebangkitan Bangsa	35.709	1.600 x 12	57.134.400
Partai Persatuan Indonesia	34.480	1.600 x 12	55.168.000
Partai Persatuan Pembangunan	26.988	1.600 x 12	43.180.800

Tabel 1.3.Potensi Kinerja Kesbangpol. dari segi Jumlah Ormas yang memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Provinsi Sulawesi Barat :

No.	Nama Ormas	Nomor & Tanggal SKT
1.	Yayasan Komunitas Sahabat Madani (Kosma)	1100.02.03/08/BKBP 10 Januari 2022
2	Wahda Islamiyah (NWDI) Sulbar	110.02.03/26/BKBP 12 Januari 2022
3	Perkumpulan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Sulbar	1100.02.03/27/BKBP 01 Desember 2022
4	Ketua Nahdlatul Wathan Prov. Sulbar	1100.02.03/34/BKBP 17 Januari 2022
5	DPP Pelangi Garuda Indonesia (PEGARINDO) Sulbar	1100.02.03/35/BKBP 17 Januari 2022
6	DPW Perkumpulan Peta Petani Indonesia Baru (PEPETANIBARU)	1100.02.03/35/BKBP 12 Januari 2022
7	Perkumpulan Mimbar Peradaban Indonesia (MABAR) Sulawesi Barat	1100.02.03/99.a/BKBP 01 Maret 2022
8	Perkumpulan Komunikasi Relawan Tatanan Ramah Bakti Kemanusiaan Sulbar	1100.02.03/16/BKBP 11 Maret 2022
9	Perkumpulan Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) Prov.Sulawesi Barat	1100.02.03/286/BKBP 21 Juli 2022

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat / golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Menurut Golongan.

Golongan				Jumlah
I	II	III	IV	
0	5	24	5	35

Tabel 2. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2023.

Pendidikan					Jumlah
SLTP	SLTA	D1 s/d D3	S1	S2	
0	6	3	27	7	35

Tabel 3.Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
25	10	35

1) Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :

- Lemhanas	= 1 Orang
- Diklat PIM I	= -
- Diklatpim II	= 0 Orang
- Diklatpim III	= 3 Orang
- Diklatpim IV	= Orang
- Diklat Prajabatan	= 34 Orang
Jumlah	= 34 Orang

2) Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut eselon adalah sebagai berikut:

- Eselon II	= 0 Orang
- Eselon III	= 5 Orang
- Eselon IV	= 11 Orang
- Staf Pelaksana	= 17 Orang
Jumlah	= 34 Orang

E. SARANA DAN PRASARANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, dari segi sarang dan prasarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja sumber daya yang dimiliki oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi barat tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ketahun masih diperlukan.

Saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jl. KH. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

Separuh Gedung Kantor Sayap paling kanan yang terdiri atas 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (Satu) ruang Bendahara, 1 (Satu) ruang Sekretaris beserta 3 Kasubag dan para stafnya serta 1 (satu) ruang untuk 4 Bidang yaitu (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Daerah; Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan). ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti Televisi, Komputer Desktop, Laptop, Printer Meja Kerja Pimpinan,Meja kerja, Printer, Lemari Arsip dan Cctv ; (*Daftar Inventaris Barang Terlampir*).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Untuk itu, maka sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dengan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tujuan tersebut maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. POTENSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
- D. SUMBERDAYA MANUSIA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
- E. SARANA DAN PRASARANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
- F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

- A. PERENCANAAN STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada pada lingkungan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Salah satu sumberdaya yang strategis dalam mengantisipasi berbagai stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan membangun SDM yang berkualitas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dimulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan maksud menyatukan gerak langkah seluruh unsur kesatuan bangsa dan politik untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026 maka Visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

Visi :**SAMPAI DISINI**

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI”

MISI :

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- **Misi Pertama : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.**
- **Misi Kedua : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya.**
- Misi Ketiga Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.
- Misi Keempat : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.
- Misi Kelima : Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah Misi Kesatu : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya, dan Misi Kedua : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi			
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fasilitas, SDM yang berkualitas dan berkinerja, mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dinamika nilai-nilai sosial budaya, agama, ekonomi, Ormas, pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan etika budaya politik serta fasilitas kelembagaan Partai Politik.	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai social budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi yang berkaitan tentang wawasan dan pengetahuan masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan yang berdemokrasi.	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berkinerja
	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	Melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	Tertanam rasa solidaritas pada masyarakat.
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, beragama dan golongan.	
		Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	
Misi2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fasilitas, SDM yang berkualitas dan berkinerja, mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dinamika nilai-nilai sosial budaya, agama, ekonomi, Ormas, pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	Mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi menjaga pentingnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Terciptanya stabilitas ilmu politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, ketentraman dan ketertiban.

bangsa, pendidikan etika budaya politik serta fasilitas kelembagaan Partai Politik.			
	Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
	Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Mengadakan fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang stabil.	Peningkatan fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan antara penerima dan pemberian atas kinerja terukur berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Berikut dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sulawesi Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 6 (Enam) Program, 11 (Sebelas) sub kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Kegiatan yang didukung dengan Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 8.137.261.131,00,- dan Realisasi Anggaran Rp.7.751.227.311,00,- (95,26%) dan sisa anggaran Rp.386.033.820,-.

Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SS 1.	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	90%
SS 2.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial	Persentase peserta yang memahami	90%

	masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	
SS 3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	80%
SS 4.	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	80%
SS 5.	Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan parpol yang terverifikasi.	100 %
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	70%
		Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.	100%
SS 6.	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	100%
		Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	100%
SS 7.	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase angka kriminalitas yang tertangani.	100%

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
SS1	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	Formulasi pengukuran : Jumlah ASN yang berkualitas dan berkinerja x 100% Jumlah ASN yang tidak berkualitas dan	Sekretariat

			berkinerja = 90%	
SS2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Formulasi pengukuran : Jumlah peserta yang paham antar suku, umat beragama dan golongan $\times 100\%$ Jumlah peserta yang tidak paham antar suku, umat beragama dan golongan = 90%	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
SS3	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	Formulasi pengukuran : Jumlah masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila $\times 100\%$ Jumlah masyarakat yang tidak paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila = 80%	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
SS4	Meningkatnya wawasan tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	Formulasi pengukuran : Jumlah masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan dan etika politik $\times 100\%$ Jumlah masyarakat yang tidak dapat mengaktualisasikan pendidikan dan etika politik = 80%	Bidang Politik Dalam Negeri
SS5	Meningkatkan fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi	Formulasi pengukuran : Jumlah Parpol yang telah diverifikasi $\times 100$ Jumlah Parpol yang belum diverifikasi =100%	Bidang Politik Dalam Negeri
SS6	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	Formulasi pengukuran : Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan,	Bidang Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

			penyalahgunaan Narkotika x 100 Persentase Ormas yang tidak menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika. =100%	
		Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	Formulasi pengukuran : Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT x 100 Persentase Ormas yang tidak terbina dan memperoleh SKT =100%	Bidang Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
SS7	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Formulasi pengukuran : Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditangani x 100 Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tidak ditangani =100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	>85 – 100%	Baik
3	>65 – 85 %	Cukup
4	>50 – 65%	Kurang
5	50 %	Sangat Kurang

Dalam mengukur tingkat persentase Capaian Kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu sebagai berikut :

➤ Semakin tinggi realisasi maka pencapaian kinerja semakin baik :

Persentase pencapaian :
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

➤ Semakin tinggi realisasi semakin rendah pencapaian kinerja :

Persentase pencapaian :
$$\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Rencana

2. Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 terdapat 7 (Tujuh) Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1) Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	98%	95,94%	95,94%	98%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 1.				95,94%	98%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 1 :**Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya**, yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 95,94% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan capaian kinerja sasaran strategi 1 tahun sebelumnya Tahun 2021 yaitu sebesar 98%, ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 2,06%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya beberapa sub kegiatan pada Bidang Sekretariat yang tidak dapat terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami refocusing (pengurangan)sebanyak 3 kali.

3. Sasaran strategi 1 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja kesekretariatan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 2,06% dari tahun sebelumnya. Semakin turun realisasi maka tidak mempengaruhi atau mengurangi output daripada kinerja di bidang Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 2 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	90%	93,21%	93,21%	93%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 2.				93,21%	93%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 pasa sasaran strategis 2 : **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 2 Tahun 2022 yaitu sebesar 93,21% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 2 tahun sebelumnya 2022 yaitu sebesar 93,21% ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,21%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

- 1. Adanya pergeseran anggaran pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
- 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami refocusing (pengurangan) sebanyak 3 kali
- 3. Sasaran strategi 2 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau membawa dampak positif pada realisasi kinerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 0,21% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi anggaran dan fisik maka akan mempengaruhi output daripada kinerja di Bidang Bina Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan semakin baik / cepat pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3) **Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 3 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	80%	93,21%	93,21%	93%

Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 3.	93,21%	93%
---	--------	-----

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 pasa sasaran strategis 3 : **Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 3 Tahun 2022 yaitu sebesar 93,21% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 3 tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 93% ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,21%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami refocusing (pengurangan) sebanyak 3 kali
3. Sasaran strategi 2 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 0,21% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan mempengaruhi output daripada kinerja di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik / cepat pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

4) **Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 4 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021
-------------------	-------------------	--------	-----------	----------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	80%	99,56%	99,56%	96%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 4.				99,56%	96%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 pasa sasaran strategis 4 : **Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 4 Tahun 2022 yaitu sebesar 99,56% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 4 Tahun 2022 yaitu sebesar 99,56% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 3,56%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Adanya pergeseran anggaran kas pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang awalnya di Triwulan IV maka dilakukan pergeseran di Triwulan III dan 10 Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan regulasi yang dapat tersalurkan dengan baik.
3. Sasaran strategi 4 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dan membawa dampak positif terhadap realisasi kinerja Bidang Politik Dalam Negeri daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 3,56% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada

meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5) **Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 5 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan parpol yang terverifikasi.	100 %	99,91%	99,91%	98%
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	70%	79,02%	79,02%	76%
	Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.	100%	98,18%	98,18%	88%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 5.				98,18%	88%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 5 :**Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada** yang terdiri dari tiga indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 5 Tahun 2022 yaitu sebesar 98,18% atau kategori **baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 5 tahun sebelumnya 2022 yaitu sebesar 88% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 10,18%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.

2. Adanya pergeseran anggaran kas pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang awalnya di Triwulan IV maka dilakukan pergeseran di Triwulan III dan 10 Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan regulasi yang dapat tersalurkan dengan baik.
3. Sasaran strategi 5 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dan berdampak positif pada realisasi kinerja Bidang Politik Dalam Negeri daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 10,18% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

[illegible]

6) Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 6 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	100%	99%	99%	99%
	Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	100%	99%	99%	99%
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 6.				99%	99%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 pada sasaran strategis 6 :**Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika**yang terdiri dari dua indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 6 Tahun 2021 yaitu sebesar 99% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 6 tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 99% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 0%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

- 1. Adanya Bencana Covid19 yang mendunia sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus merefocusing anggaran, sebanyak 7 Kali.
- 2. Sasaran strategi 6 ini didukung oleh 2 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dari pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 0% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output dari pada kinerja di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7) **Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategi 7 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan	Persentase angka kriminalitas yang tertangani.	100%	99%	99%	98%

cegah dini.					
Rata- rata Persentase Capaian Kinerja SS 7.				99%	98%

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 pada sasaran strategis 7 : **Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 7 Tahun 2021 yaitu sebesar 99% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 7 tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 98% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 1%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya Bencana Covid19 yang mendunia sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus merefocusing anggaran, sebanyak 7 kali.
2. Sasaran strategi 7 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 1% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tabel 3.9 : Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021:

No.	Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	DAU APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	DAU APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	DAU APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	DAU APBD
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	DAU APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	DAU APBD

7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran.	DAU APBD
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	DAU APBD
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	DAU APBD
10	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.	DAU APBD
11	Penyediaan Bahan Material.	DAU APBD
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	DAU APBD
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	DAU APBD
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	DAU APBD
15	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.	DAU APBD
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	DAU APBD
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	DAU APBD
18	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	DAU APBD
19	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
20	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
21	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD

22	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	DAU APBD
23	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	DAU APBD
24	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	DAU APBD
25	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
29	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.	DAU APBD

3. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 memperoleh alokasi dana sebesar Rp.10.340.810.534.00,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut, rincian Realisasi Anggaran persasaran :

- ❖ Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1.	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	125.738.624	120.285.520	95.66
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	3.948.226.190	3.898.489.115	98.74
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	0	0	0.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	422.419.148	414.917.833	98.22
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	72.883.800	70.054.250	96.12

		Pemerintahan Daerah.			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	207.030.000	194.031.597	93.72
Jumlah Total Pagu Sasaran 1			4.776.297.762	4.697.778.315	98.36

- ❖ Sasaran Strategi 2 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan; dan
- ❖ Sasaran Strategi 3 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

No.	SASARAN	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
2. & 3.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan; dan Meningkatnya pemahaman masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	565.050.185	526.722.690	93.22

	tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.				
Jumlah Total Pagu Sasaran 2 dan 3			565.050.185	526.722.690	93.22

- ❖ Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi; dan
- ❖ Sasaran Strategi 5 : Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
4. & 5.	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi; dan Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	1.816.527.038	1.744.257.040	96.02

	mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.			
Jumlah Total Pagu Sasaran 4 dan 5			1.816.527.038	1.744.257.040	96.02

❖ Sasaran Strategi 6 : Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
6.	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	91.615.599	91.004.770	99.33
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	438.504.400	341.571.990	77.89

		Budaya.			
Jumlah Total Pagu Sasaran 6			530.119.999	432.576.760	81.59

❖ Sasaran Strategi 7 : Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
7.	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	2.652.815.550	2.637.306.681	99.42
Jumlah Total Pagu Sasaran 7			2.652.815.550	2.637.306.681	99.42

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	>85 – 100%	Baik
3	>65 – 85 %	Cukup
4	>50 – 65%	Kurang
5	50 %	Sangat Kurang

Dalam mengukur tingkat persentase Capaian Kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu sebagai berikut :

➤ Semakin tinggi realisasi maka pencapaian kinerja semakin baik :

Persentase pencapaian :
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

➤ Semakin tinggi realisasi semakin rendah pencapaian kinerja :

Persentase pencapaian :
$$\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Hasil dan Analisis Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 terdapat 7 (Tujuh) Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini.

TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1) Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada Sasaran 1 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket.
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	90%	95,94%	95,94%	Baik
Rata- rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS 1.				95,94%	Baik

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 1 :**Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya**, yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 95,94% atau kategori **baik**, jika dibandingkan capaian kinerja sasaran strategi 1 tahun sebelumnya Tahun 2021 yaitu sebesar 98%, ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 2,06%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

- Adanya beberapa sub kegiatan pada Bidang Sekretariat yang tidak dapat terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.

- 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami refocusing (pengurangan)sebanyak 3 kali.
- 3. Sasaran strategi 1 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja kesekretariatan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 2,06% dari tahun sebelumnya. Semakin turun realisasi maka tidak mempengaruhi atau mengurangi output daripada kinerja di bidang Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.**

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada sasaran strategi 2 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	90%	93,21%	93,21%	Baik
Rata- rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS 2.				93,21%	Baik

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 2 : **Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika

dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 2 Tahun 2022 yaitu sebesar 93,21% atau kategori **baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 2 tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 93,00% ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,21%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami refocusing (pengurangan) sebanyak 3 kali.
3. Sasaran strategi 2 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau membawa dampak positif pada realisasi kinerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 0,21% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi anggaran dan fisik maka akan mempengaruhi output daripada kinerja di Bidang Bina Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan semakin baik / cepat pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada sasaran strategi 3 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat	Persentase masyarakat yang paham	80%	93,21%	93,21%	Baik

tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.				
Rata- rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS 3.				93,21%	Baik

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 3 : **Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 3 Tahun 2022 yaitu sebesar 93,21% atau kategori **sangat baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 3 tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 93% ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,21%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik, dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami refocusing (pengurangan) sebanyak 3 kali.
3. Sasaran strategi 2 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 0,21% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan mempengaruhi output daripada kinerja di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik / cepat pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

4) Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada sasaran strategi 4 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	80%	99,56%	99,56%	Baik
Rata-rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS.4				99,56%	Baik

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 4 : **Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi** yang terdiri dari satu indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 4 Tahun 2022 yaitu sebesar 99,56% atau kategori **baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 4 Tahun 2022 yaitu sebesar 99,56% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 3,56%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Adanya pergeseran anggaran kas pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang awalnya di Triwulan IV maka dilakukan pergeseran di Triwulan III dan

10 Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan regulasi yang dapat tersalurkan dengan baik.

3. Sasaran strategi 4 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dan membawa dampak positif terhadap realisasi kinerja Bidang Politik Dalam Negeri daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 3,56% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5) Meningkatkan fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada sasaran strategi 5 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.6 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan parpol yang terverifikasi.	100 %	99,91%	99,91%	Baik
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	70%	79,02%	79,02%	Cukup
	Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.	100%	98,18%	98,18%	Baik
Rata-rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS.5				92,37%	Baik

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 5 : **Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada** yang terdiri dari tiga indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 5 Tahun 2022 yaitu sebesar 92,37% atau kategori **baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 5 tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 88,61% ini menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 3,76%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Adanya pergeseran anggaran kas pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang awalnya di Triwulan IV maka dilakukan pergeseran di Triwulan III dan 10 Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan regulasi yang dapat tersalurkan dengan baik.
3. Sasaran strategi 5 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi dan berdampak positif pada realisasi kinerja Bidang Politik Dalam Negeri daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat naik menjadi 3,76% dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau menambah nilai output daripada kinerja di bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

6) Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada sasaran strategi 6 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6
Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	100%	95,95%	95,95%	Baik
	Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	100%	98,67%	98,67%	Baik
Rata- rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS 6.				97,31%	Baik

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 6 : **Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika** yang terdiri dari dua indikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 6 Tahun 2022 yaitu sebesar 97,31% atau kategori **baik**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategi 6 tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 99% ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja sebesar 2,31%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Adanya refocusing anggaran pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Oragnisasi Kemasyarakatan; Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **(Pemberian Dana Hibah Ormas Dewan Harian Daerah 45)**, dikarenakan tidak dapat memenuhi administrasi Dana Hibah sesuai dengan regulasi yang dipedomani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp.100.000.000,

3. Sasaran strategi 6 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 2,31% dari tahun sebelumnya. Semakin rendah realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau mengurangi nilai output tetapi mengurangi nilai kinerja di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7) **Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.**

Untuk mengukur analisis dan evaluasi kinerja pada sasaran strategi 7 yang dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase angka kriminalitas yang tertangani.	100%	79,33%	79,33%	Cukup
Rata-rata Persentase Analisis dan Evaluasi Kinerja SS.7				79,33%	Cukup

Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran strategis 7 : **Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini** yang terdiri dari satuindikator kinerja jika dirata-ratakan maka dicapai persentase untuk capaian kinerja sasaran strategi 7 Tahun 2022 yaitu sebesar 79,33% atau kategori **cukup**, jika dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran strategi 7 tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar 99,42% ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja sebesar 20,09%.

Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah terealisasi dengan baik dikarenakan oleh adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran sebagai bentuk kerjasama dengan Pesawat Susi Air demi mendukung IKN.
2. Adanya refocusing anggaran pada masing-masing Sub. Kegiatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang telah terlaksanakan dengan baik. Namun disatu sisi terjadi penambahan anggaran pada Sub. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi sebesar Rp.100.000.000,-, tetapi anggaran tersebut tidak dapat terealisasikan seperti yang diharapkan, sehingga hal tersebut mengurangi realisasi sebesar 20,09% dari tahun sebelumnya.
3. Sasaran strategi 7 ini didukung oleh 1 Program yang ditangani langsung oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengurangi realisasi kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial daripada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat turun menjadi 20,09% dari tahun sebelumnya. Semakin rendah realisasi maka akan sangat mempengaruhi atau mengurangi nilai output tetapi tidak mengurangi nilai kinerja di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini berdasarkan pada meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan sebagai perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tabel 3.9 : Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022:

No.	Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	DAU APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	DAU APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	DAU APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	DAU APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-	DAU APBD

	SKPD.	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	DAU APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	DAU APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	DAU APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran.	DAU APBD
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	DAU APBD
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	DAU APBD
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	DAU APBD
13	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.	DAU APBD
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	DAU APBD
15	Penyediaan Bahan Material.	DAU APBD
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	DAU APBD
17	Pengadaan Mebel.	DAU APBD
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	DAU APBD
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	DAU APBD
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	DAU APBD
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	DAU APBD
22	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.	DAU APBD
23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	DAU APBD
24	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	DAU APBD
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	DAU APBD
26	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	DAU APBD

	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	
27	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
28	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
29	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	DAU APBD
30	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	DAU APBD
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	DAU APBD
32	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	DAU APBD
33	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
34	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	DAU APBD

	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	
35	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
36	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	DAU APBD
37	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.	DAU APBD

B. Realisasi Anggaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 memperoleh alokasi dana sebesar Rp.8.137.261.131.00,- (Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut, rincian Realisasi Anggaran persasaran :

- ❖ Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya. (Tabel 3.10)

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1.	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	218.787.786,-	208.915.900,-	95,49
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	3.766.427.755,-	3.625.607.084,-	96,26

	yang terpercaya.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	139.142.930,-	135.315.436,-	97,25
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	520.034.482,-	508.607.991,-	97,80
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	173.549.920,-	173.359.800,-	99,89
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	76.462.648,-	69.866.800,-	91,37
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	202.040.000,-	167.956.683,-	83,13
Jumlah Total Pagu Sasaran 1			5.096.445.521,-	4.889.629.694,-	95,94

- ❖ Sasaran Strategi 2 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan; dan
- ❖ Sasaran Strategi 3 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tabel (3.11).

No.	SASARAN	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
2. & 3.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan; dan Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	422.771.000,-	394.069.400,-	93,21
Jumlah Total Pagu Sasaran 2 dan 3			422.771.000,-	394.069.400,-	93,21

- ❖ Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan wawasan masyarakat tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi; dan
- ❖ Sasaran Strategi 5 : Meningkatkan fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.(Tabel 3.12).

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
4. & 5.	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pendidikan etika	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	1.600.767.100,-	1.593.749.957,-	99,56

	budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi; dan Meningkatkan fasilitas kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.			
Jumlah Total Pagu Sasaran 4 dan 5			1.600.767.100,-	1.593.749.957,-	99,56

❖ Sasaran Strategi 6 : Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika. (Tabel 3.12)

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
6.	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	138.020.000,-	136.182.000,-	98,67
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	241.192.500,-	231.435.800,-	95,95

Jumlah Total Pagu Sasaran 6	379.212.500,-	367.617.800,-	96,94
-----------------------------	---------------	---------------	-------

❖ Sasaran Strategi 7 : Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.(Tabel 3.14).

No.	SASARAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
7.	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	638.045.010	506.160.460,-	79,33
Jumlah Total Pagu Sasaran 7			638.045.010	506.160.460,-	79,33

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik.
3. Perlunya kelengkapan data terkait tentang (Parpol, IDI, Ormas dan Peta Rawan Konflik).
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Pemprov. Dan pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan program kegiatan.
5. Terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris dan kepala bidang yang ada pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara lebih intensif untuk melakukan seleksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) / Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing agar lebih berkualitas.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim TAPD terkait pemberian anggaran agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang jauh lebih baik ke depan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se- Sulawesi Barat di 6 Kabupaten (Mamuju, Mateng, Pasangkayu,

Majene, Polman dan Mamasa) di tingkat daerah ; Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta beberapa instansi terkait tentang data-data tersebut.

- 4. Memberikan peningkatan, pengetahuan dan Bimbingan Teknis Intelijen bagi petugas intel kantor.
- 5. Membentuk tim-tim teknis terkait beberapa kegiatan untuk Penanganan Rawan Konflik, IDI, Verifikasi Parpol, FKDM, FKUB, FPK, Ormas, Pemantauan Orang Asing dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (LKjIP-BKBP Prov. Sulbar Thn 2022) ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja, kegiatan pada waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Februari 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

AMRI EKASAKTI, ST
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19670704 1994 199403 1 022